

**KELURAHAN LOLU UTARA
KOTA PALU**

**PUBLIKASI HASIL SURVEI
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KELURAHAN LOLU UTARA 2026**

Dalam Rangka Program Kelurahan Cantik Lolu Utara 2026

Diterbitkan oleh:
**Kelurahan Lolu Utara
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas tersusunnya Publikasi Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama Kelurahan Lolu Utara 2026. Publikasi ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) Lolu Utara 2026, sebuah inisiatif untuk membangun budaya sadar data dan statistik di tingkat kelurahan melalui pemotretan kondisi sosial masyarakat secara langsung berbasis data lapangan.

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan pembangunan yang inklusif, khususnya di wilayah dengan keberagaman agama, suku, dan latar belakang sosial-ekonomi yang tinggi seperti Kelurahan Lolu Utara. Survei ini dirancang untuk memotret berbagai dimensi kerukunan, mulai dari interaksi sosial sehari-hari, aktivitas keagamaan, sikap toleransi dan kesetaraan, kesediaan bekerja sama lintas agama, pengalaman diskriminatif, tingkat kepercayaan sosial, hingga potensi politisasi agama dan peran kelembagaan lokal seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Data dikumpulkan dari 204 responden yang tersebar di seluruh wilayah RT/RW Kelurahan Lolu Utara melalui kuesioner terstruktur. Seluruh jawaban responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan digunakan semata-mata untuk kepentingan analisis statistik agregat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan survei ini. Kami menyadari publikasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah kelurahan, pemangku kepentingan lintas agama, serta masyarakat luas dalam upaya menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kelurahan Lolu Utara.

Palu, Juli 2026
Lurah Lolu Utara

ABDUL ARIFIN, S.SOS
NIP. 19800402 200801 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Metodologi.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PROFIL RESPONDEN.....	6
BAB III INTERAKSI DAN BAURAN SOSIAL ANTARUMAT BERAGAMA.....	8
BAB IV AKTIVITAS KEAGAMAAN.....	9
BAB V DIMENSI TOLERANSI.....	10
BAB VI DIMENSI KESETARAAN.....	11
BAB VII DIMENSI KERJA SAMA.....	12
BAB VIII KEMUDAHAN BERIBADAH DAN PENGALAMAN DISKRIMINATIF.....	13
8.1 Kemudahan Melaksanakan Ibadah.....	13
8.2 Pengalaman Diskriminatif.....	13
BAB IX TINGKAT KEPERCAYAAN SOSIAL.....	15
BAB X PELIBATAN DALAM PERKUMPULAN MASYARAKAT.....	16
BAB XI PENGETAHUAN PROGRAM/KEBIJAKAN KERUKUNAN PEMERINTAH DAERAH.....	17
BAB XII POTENSI POLITISASI AGAMA.....	18
BAB XIII PERAN FKUB, TOKOH AGAMA, DAN KEARIFAN LOKAL.....	19
BAB XIV PERISTIWA MASA LALU: DENDAM SEJARAH DAN PEMAAFAN.....	20
BAB XV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21
15.1 Kesimpulan.....	21
15.2 Rekomendasi.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan Lolu Utara merupakan salah satu wilayah di Kota Palu yang memiliki karakteristik keberagaman agama dan suku bangsa yang cukup tinggi, sebagai hasil dari sejarah migrasi dan interaksi antaretnis yang panjang di Sulawesi Tengah. Keberagaman ini merupakan modal sosial yang berharga, namun sekaligus memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menjadi sumber gesekan sosial.

Survei Kerukunan Umat Beragama Lolu Utara 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) 2026 yang bertujuan mendorong pemanfaatan data dan statistik dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Melalui survei ini, kondisi objektif kerukunan umat beragama di Kelurahan Lolu Utara dapat dipotret secara terukur, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

1.2 Tujuan

- Memotret profil demografi dan sosial-ekonomi masyarakat Kelurahan Lolu Utara.
- Mengukur tingkat interaksi dan bauran sosial antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.
- Mengukur dimensi toleransi, kesetaraan, dan kesediaan bekerja sama lintas agama.
- Mengidentifikasi pengalaman diskriminatif dan tingkat kemudahan beribadah bagi kelompok minoritas agama.
- Mengukur tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) masyarakat terhadap berbagai pihak.
- Mengidentifikasi potensi politisasi agama serta peran kelembagaan lokal dalam menjaga kerukunan.
- Menyediakan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan terkait.

1.3 Ruang Lingkup dan Metodologi

Survei ini dilaksanakan di seluruh wilayah RT/RW Kelurahan Lolu Utara dengan melibatkan 204 responden yang dipilih untuk merepresentasikan keberagaman wilayah, usia, jenis kelamin, dan latar belakang agama. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan secara langsung kepada responden terpilih, mencakup 13 (tiga belas) bagian: (A) Identitas Responden, (B) Interaksi dan Bauran dengan Penganut Agama Lain, (C) Aktivitas Beribadah, (D) Dimensi Toleransi, (E) Dimensi Kesetaraan, (F) Dimensi Kerja Sama, (G) Pengalaman Diskriminatif, (H) Tingkat Kepercayaan pada Pihak Lain, (I) Pelibatan Perkumpulan Masyarakat, (J) Sinergi Program Kerukunan, (K) Politisasi Agama, (L) Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kearifan Lokal, serta (M) Peristiwa Masa Lalu.

Analisis dalam publikasi ini bersifat deskriptif, disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama di Kelurahan Lolu Utara secara umum. Seluruh hasil olahan bersumber dari data primer yang dikumpulkan pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyajian

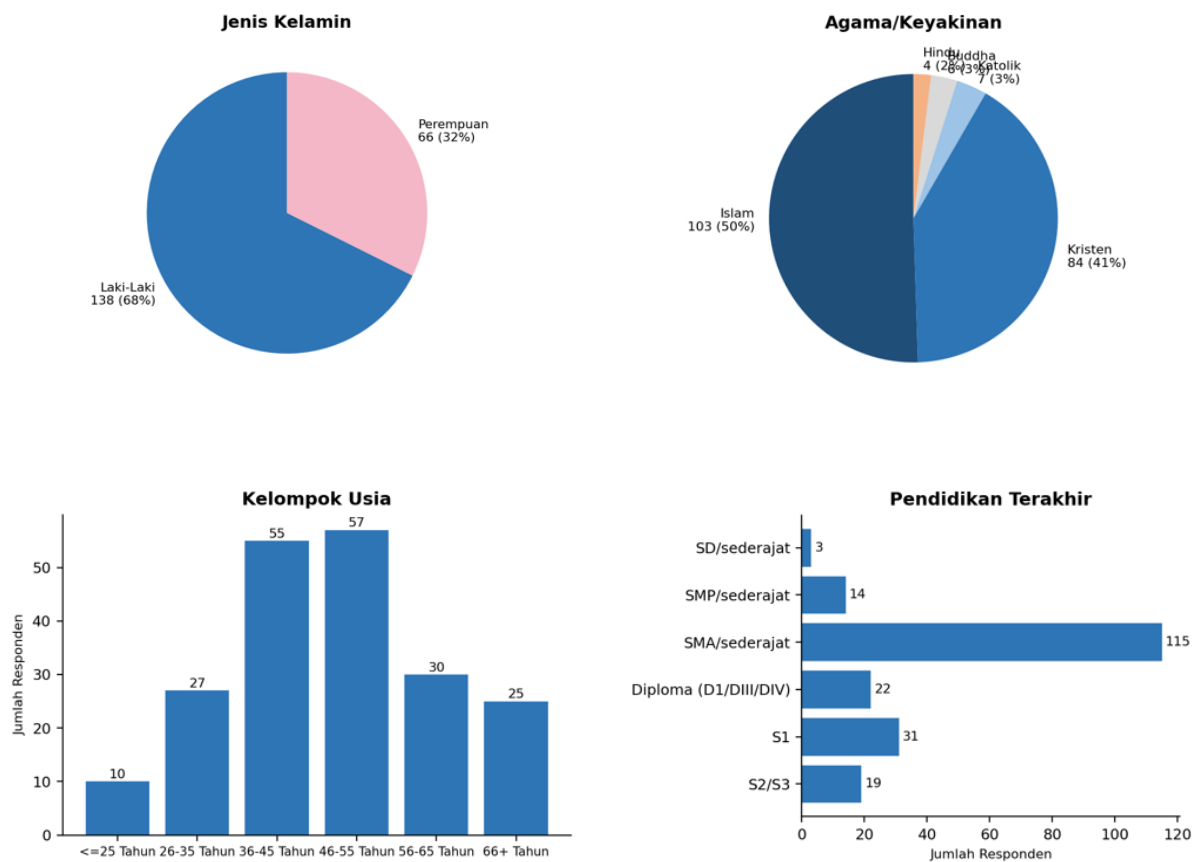
Publikasi ini disusun secara terstruktur ke dalam lima belas bab untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kerukunan umat beragama. Pembahasan diawali pada Bab I yang menguraikan latar belakang penelitian, tujuan survei, serta metodologi dan ruang lingkup pelaksanaan operasional di lapangan. Selanjutnya, Bab II menyajikan profil demografi responden untuk memetakan karakteristik dasar dari 204 sampel yang terlibat, meliputi sebaran wilayah RT/RW, kelompok usia, jenis kelamin, hingga latar belakang agama mereka.

Inti dari publikasi ini terletak pada Bab III sampai dengan Bab XIV, yang secara spesifik menyajikan hasil analisis deskriptif mendalam dari setiap dimensi kerukunan umat beragama. Analisis pada bagian ini disajikan secara berurutan berdasarkan struktur kuesioner yang digunakan, mulai dari aspek interaksi dan bauran antarumat beragama, dimensi toleransi, kesetaraan, kerja sama, hingga potensi politisasi agama dan evaluasi peran forum kerukunan lokal. Rangkaian pembahasan tersebut kemudian ditutup pada Bab XV yang memuat kesimpulan umum dari seluruh temuan lapangan serta poin-poin rekomendasi kebijakan yang strategis.

BAB II

PROFIL RESPONDEN

Survei ini melibatkan 204 responden yang tersebar di wilayah Kelurahan Lolu Utara. Sebagian besar responden (67,6 persen) berjenis kelamin laki-laki dan 32,4 persen berjenis kelamin perempuan. Dari sisi agama/keyakinan, mayoritas responden menganut agama Islam (50,5 persen / 103 orang) dan Kristen (41,2 persen), diikuti oleh Katolik (3,4 persen), Buddha (2,9 persen), dan Hindu (2,0 persen) sebuah komposisi yang mencerminkan keberagaman keagamaan yang menjadi fokus utama survei ini.

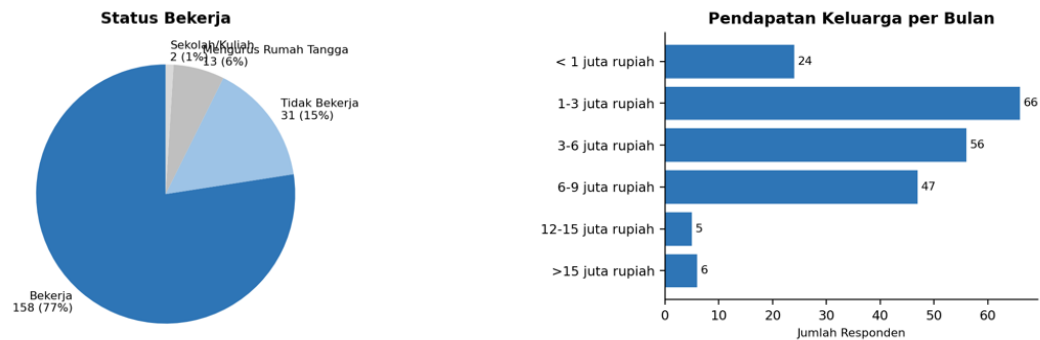


Gambar 2.1 Profil Demografi Responden: Jenis Kelamin, Agama, Kelompok Usia, dan Pendidikan Terakhir

Dari sisi usia, responden tersebar cukup merata pada kelompok usia produktif, dengan proporsi terbesar pada kelompok usia 46-55 Tahun (27,9 persen) dan 36-45 Tahun (27,0 persen). Tingkat pendidikan responden tergolong cukup baik, dengan 91,7 persen responden telah menamatkan pendidikan setingkat SMA/ sederajat ke atas, termasuk 35,3 persen yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma, S1, hingga S2/S3).

Sebanyak 77,5 persen responden berstatus bekerja, sementara sisanya mengurus rumah tangga, bersekolah, atau tidak bekerja. Dari sisi pendapatan keluarga per bulan, kelompok pendapatan Rp1-3 juta (32,4 persen) dan Rp3-6 juta (27,4 persen) mendominasi, dengan 44,1 persen responden berada pada

kelompok pendapatan di bawah Rp 3 juta per bulan menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.



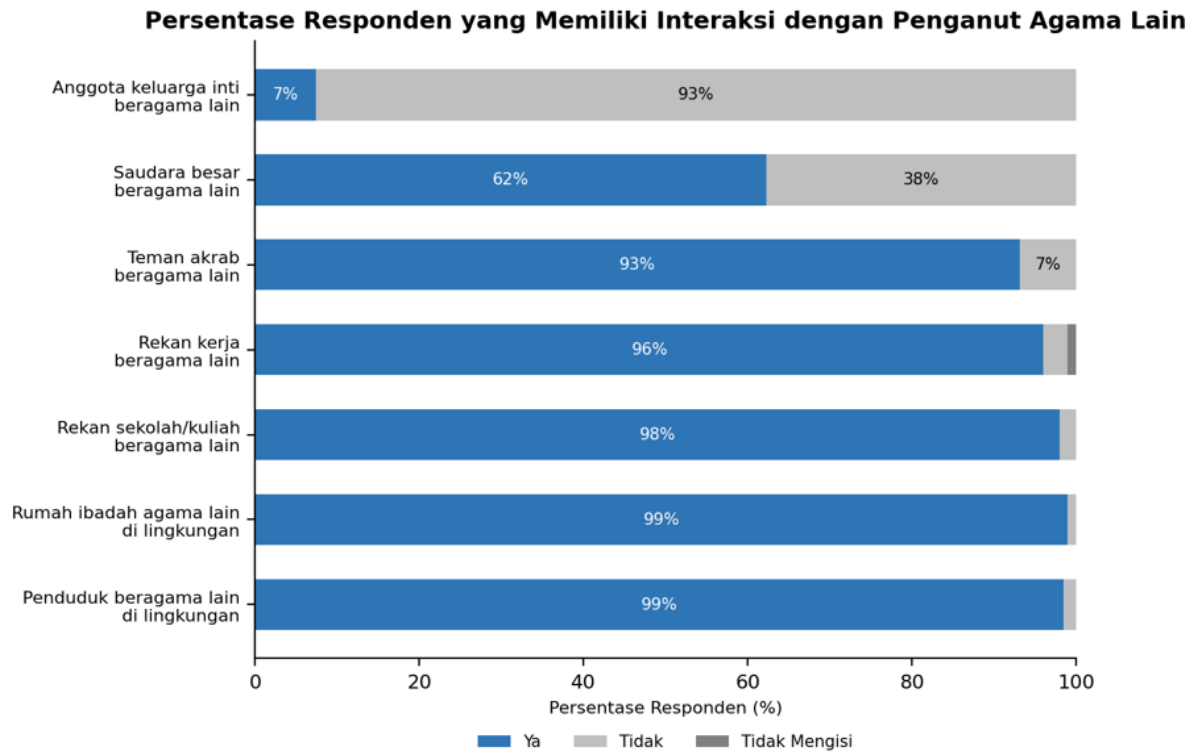
Gambar 2.2 Status Bekerja dan Pendapatan Keluarga per Bulan

Sebanyak 76,1 persen responden berstatus bekerja, sementara sisanya mengurus rumah tangga, bersekolah, atau tidak bekerja. Dari sisi pendapatan keluarga per bulan, kelompok pendapatan Rp1–3 juta dan Rp3–6 juta mendominasi, dengan 44,2 persen responden berada pada kelompok pendapatan di bawah Rp3 juta per bulan menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

BAB III

INTERAKSI DAN BAURAN SOSIAL ANTARUMAT BERAGAMA

Bagian ini mengukur sejauh mana responden memiliki kontak dan interaksi langsung dengan penganut agama lain dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari keluarga inti, keluarga besar, pertemanan, tempat kerja, sekolah, hingga lingkungan tempat tinggal.



Gambar 3.1 Persentase Responden yang Memiliki Interaksi dengan Penganut Agama Lain

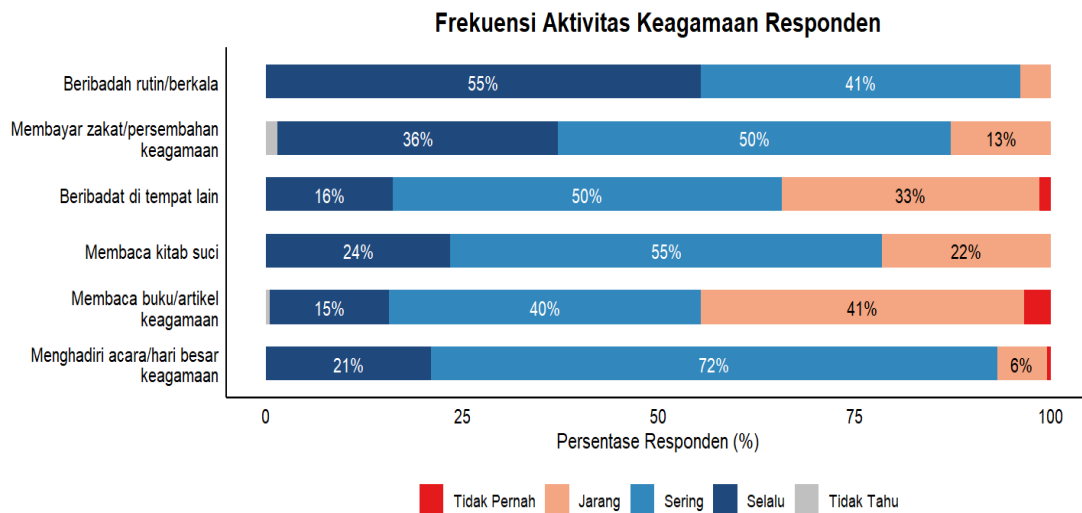
Hasil survei menunjukkan bahwa bauran sosial antarumat beragama di Lolu Utara berlangsung sangat intensif pada ranah publik: 98,0 persen responden memiliki rekan penganut agama lain di sekolah/ perguruan tinggi, 98,5 persen memiliki penduduk penganut agama lain di lingkungan tempat tinggalnya, dan 99,0 persen mengaku ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kelurahannya. Interaksi di dunia kerja juga tinggi, dengan 96,1 persen responden mengaku memiliki rekan kerja penganut agama lain, dan 93,1 persen memiliki teman akrab dari agama lain.

Sebaliknya, pada ranah keluarga inti, bauran lintas agama jauh lebih rendah, hanya 7,3 persen responden memiliki anggota keluarga inti yang menganut agama berbeda. Angka ini meningkat pada cakupan keluarga besar (garis kakek-nenek dan/atau perkawinan), yaitu 62,2 persen. Pola ini wajar mengingat pernikahan antaragama umumnya lebih jarang terjadi dibandingkan interaksi sosial di ranah publik, namun menunjukkan bahwa kerukunan di Lolu Utara didorong terutama oleh kedekatan sosial-kewargaan (pertemanan, ketetanggaan, dan dunia kerja) ketimbang oleh ikatan kekerabatan lintas agama.

BAB IV

AKTIVITAS KEAGAMAAN

Bagian ini menggambarkan intensitas praktik keagamaan responden, yang menjadi konteks penting untuk memahami seberapa aktif kehidupan beragama masyarakat Lolu Utara sebelum menilai sikap mereka terhadap kelompok agama lain.



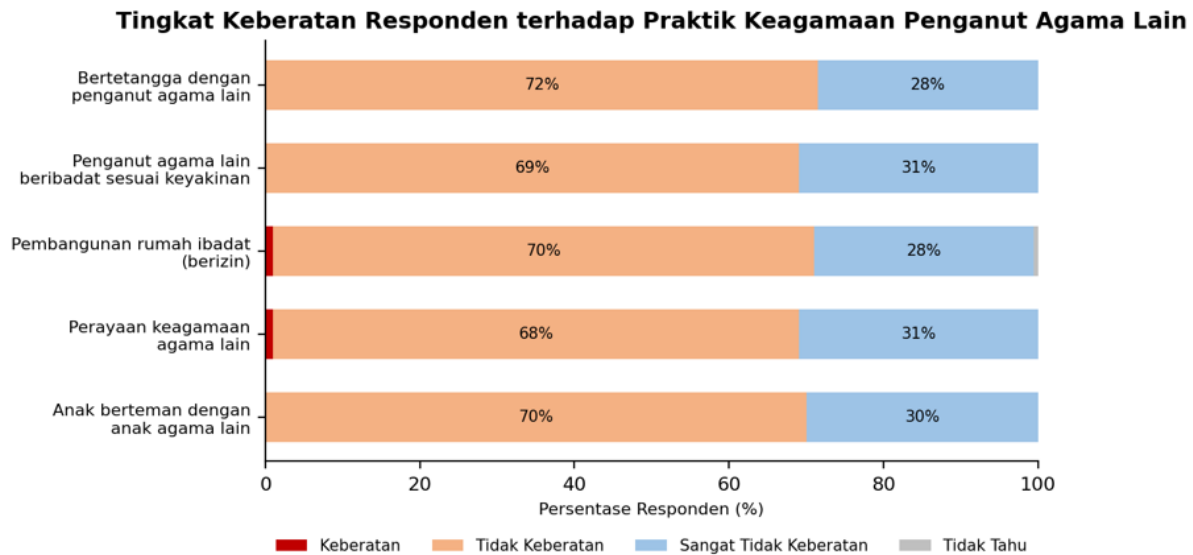
Gambar 4.1 Frekuensi Aktivitas Keagamaan Responden

Mayoritas responden menjalankan ibadah rutin secara aktif: 96,1 persen mengaku selalu atau sering beribadah secara rutin/berkala, dan 78,4 persen selalu atau sering membaca kitab suci/teks suci keagamaan. Kewajiban filantropi keagamaan (zakat/persepuluhan/dana punia) juga dijalankan secara aktif oleh 85,8 persen responden. Aktivitas membaca buku/artikel keagamaan relatif lebih jarang dibandingkan aktivitas ibadah inti lainnya, dengan 41,2 persen responden menyatakan jarang melakukannya mengindikasikan bahwa literasi keagamaan tekstual belum semerata praktik ritual keagamaan itu sendiri. Kehadiran pada acara/hari besar keagamaan tergolong tinggi, dengan 93,1 persen responden selalu atau sering menghadirinya.

BAB V

DIMENSI TOLERANSI

Dimensi toleransi mengukur sejauh mana responden tidak keberatan terhadap eksistensi dan praktik keagamaan penganut agama lain di sekitar mereka.



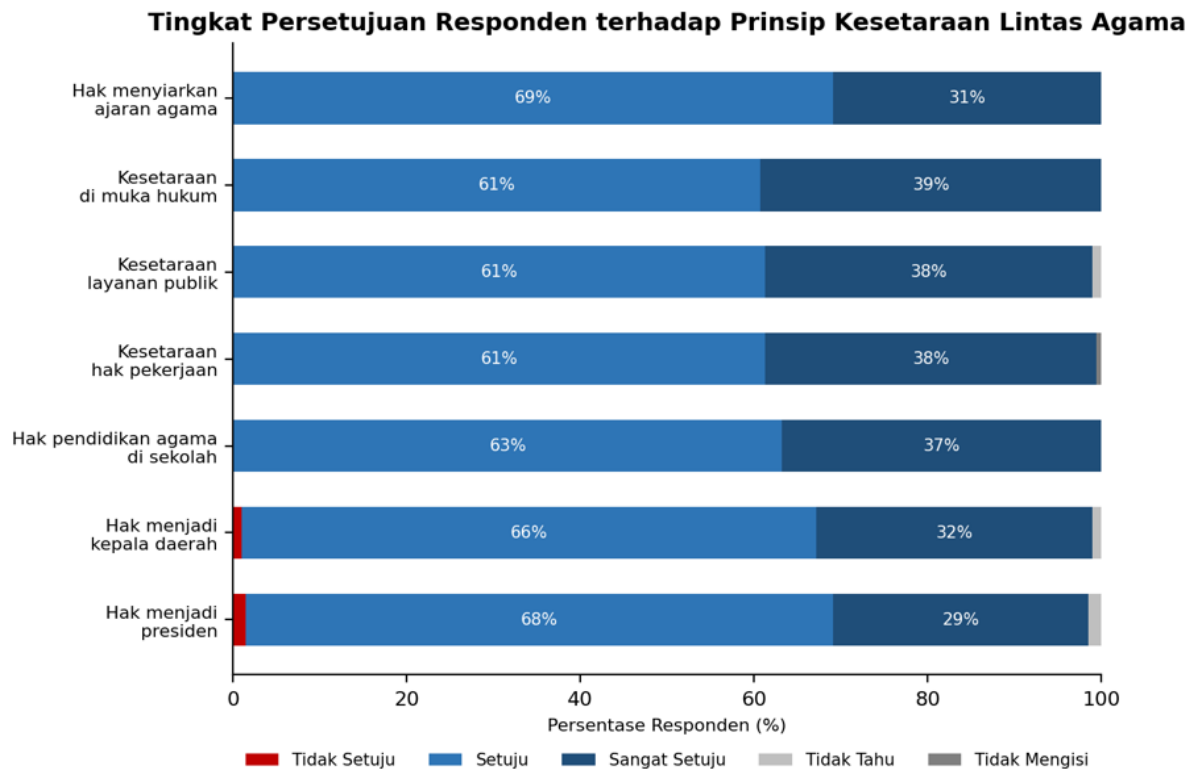
Gambar 5.1 Tingkat Keberatan Responden terhadap Praktik Keagamaan Penganut Agama Lain

Tingkat toleransi masyarakat Lolu Utara tergolong sangat tinggi pada seluruh indikator yang diukur. Sebanyak 100,0 persen responden menyatakan tidak keberatan hidup bertetangga dengan penganut agama lain, dan 100,0 persen tidak keberatan terhadap penganut agama lain yang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Demikian pula, 100,0 persen tidak keberatan anak-anak mereka berteman dengan anak-anak penganut agama lain, 99,0 persen tidak keberatan terhadap perayaan keagamaan agama lain di lingkungannya, dan 98,5 persen tidak keberatan terhadap pembangunan rumah ibadat agama lain sepanjang telah mendapat izin dari pemerintah. Hanya sebagian sangat kecil responden yang menyatakan keberatan, terutama pada isu pembangunan rumah ibadat baru dan perayaan keagamaan.

BAB VI

DIMENSI KESETARAAN

Dimensi kesetaraan mengukur sejauh mana responden setuju bahwa seluruh warga negara, apa pun agamanya, memiliki hak yang sama di berbagai bidang kehidupan bernegara.



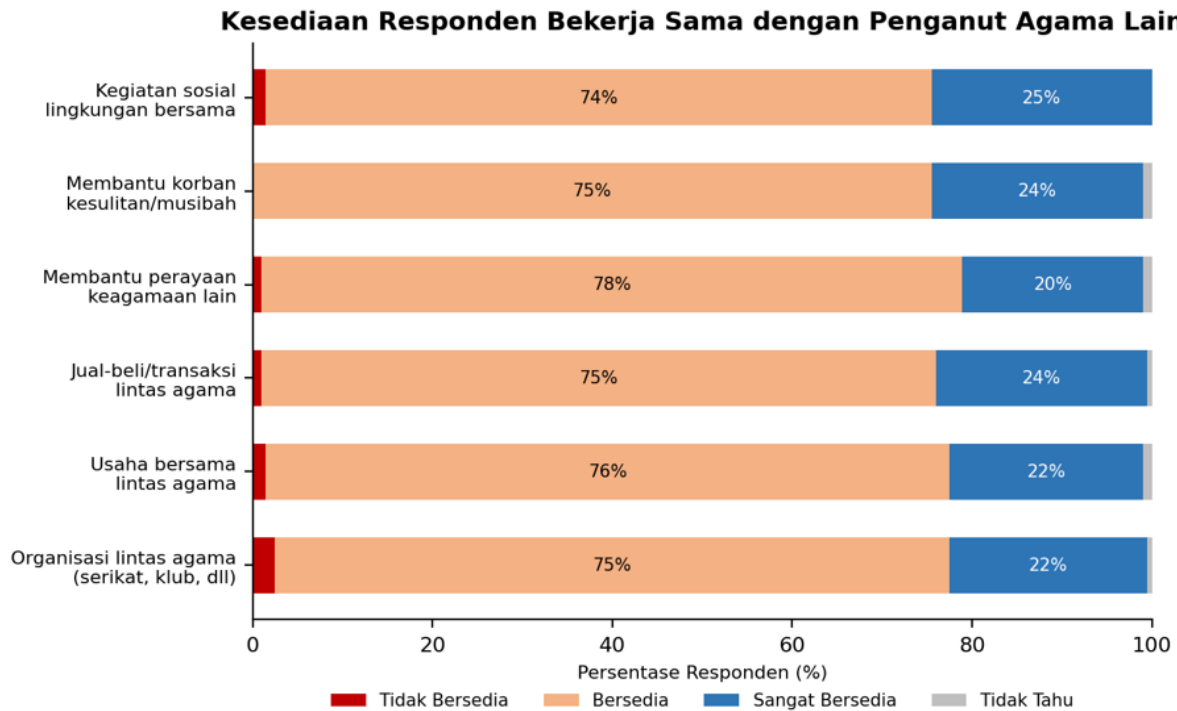
Gambar 6.1 Tingkat Persetujuan Responden terhadap Prinsip Kesetaraan Lintas Agama

Dukungan terhadap prinsip kesetaraan sangat kuat di seluruh indikator. Sebanyak 100,0 persen responden setuju atau sangat setuju bahwa semua kelompok agama berhak menyiarkan ajarannya sesuai peraturan perundang-undangan, dan 100,0 persen setuju bahwa setiap warga negara sama di muka hukum apa pun agamanya. Dukungan terhadap kesetaraan akses layanan publik (99,0 persen) dan pekerjaan (99,5 persen) juga sangat tinggi. Menariknya, tingkat persetujuan sedikit menurun meski tetap sangat tinggi pada isu hak politik: 98,0 persen setuju warga negara berhak menjadi kepala daerah apa pun agamanya, dan 97,1 persen setuju atas hak menjadi Presiden Republik Indonesia. Pola ini mengindikasikan bahwa penerimaan terhadap kesetaraan sipil dan sosial sudah hampir mutlak, sementara penerimaan terhadap kesetaraan pada jabatan politik tertinggi, walau tetap sangat tinggi, relatif sedikit lebih rendah.

BAB VII

DIMENSI KERJA SAMA

Dimensi kerja sama mengukur kesediaan responden untuk terlibat dalam aktivitas bersama dengan penganut agama lain, mulai dari kegiatan sosial hingga kerja sama ekonomi.



Gambar 7.1 Kesediaan Responden Bekerja Sama dengan Penganut Agama Lain

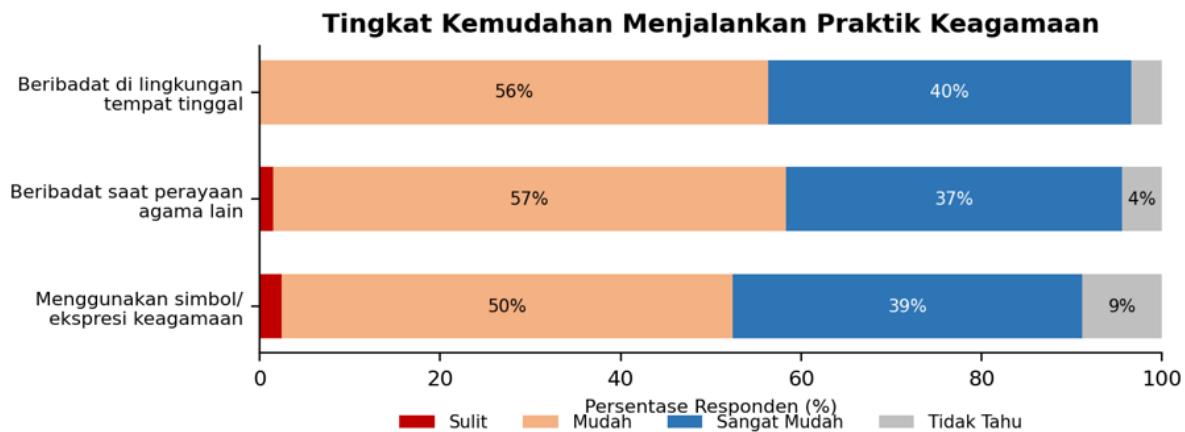
Kesediaan bekerja sama lintas agama sangat tinggi, dengan seluruh indikator berada pada kisaran 96-99 persen responden menyatakan bersedia atau sangat bersedia. Kesediaan tertinggi terlihat pada kegiatan saling membantu saat musibah (99,0 persen) dan partisipasi dalam kegiatan sosial lingkungan (98,5 persen). Kesediaan untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi yang lebih erat, seperti menjalankan usaha bersama (97,6 persen) atau berorganisasi bersama dalam serikat/klub (97,1 persen), tetap sangat tinggi meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan bentuk kerja sama sosial yang lebih insidental. Hal ini menunjukkan modal sosial lintas agama di Lolu Utara yang kuat, tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga fungsional.

BAB VIII

KEMUDAHAN BERIBADAH DAN PENGALAMAN DISKRIMINATIF

8.1 Kemudahan Melaksanakan Ibadah

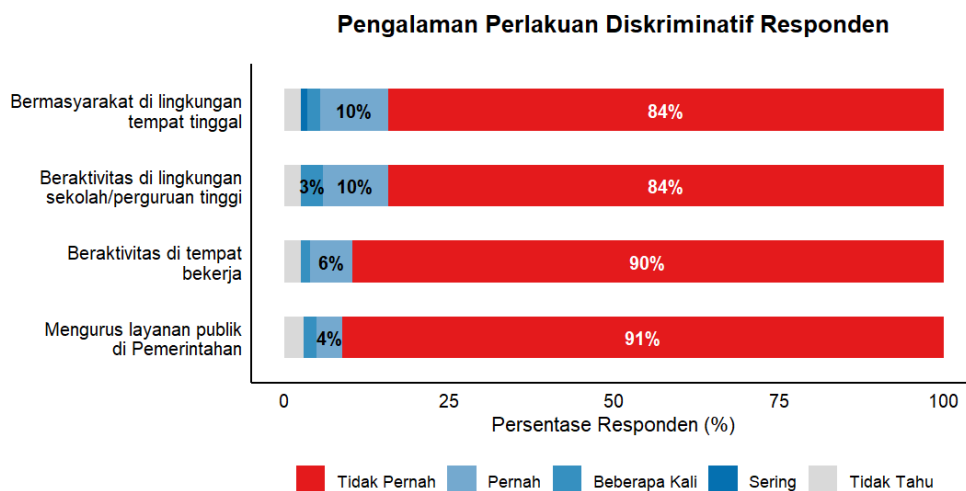
Bagian ini mengukur persepsi responden terhadap kemudahan menjalankan praktik keagamaan mereka sendiri di lingkungan yang majemuk.



Gambar 8.1 Tingkat Kemudahan Menjalankan Praktik Keagamaan

Secara umum, responden merasa mudah menjalankan praktik keagamaannya: 96,6 persen menyatakan mudah/sangat mudah beribadat di lingkungan tempat tinggal, 94,1 persen mudah/sangat mudah beribadat ketika penganut agama lain sedang merayakan hari besar keagamaan, dan 88,7 persen mudah/sangat mudah menggunakan simbol atau atribut keagamaan di tempat umum. Proporsi yang menjawab “sulit” pada seluruh indikator sangat kecil, menegaskan iklim yang kondusif bagi kebebasan menjalankan ibadah di Lolu Utara.

8.2 Pengalaman Diskriminatif



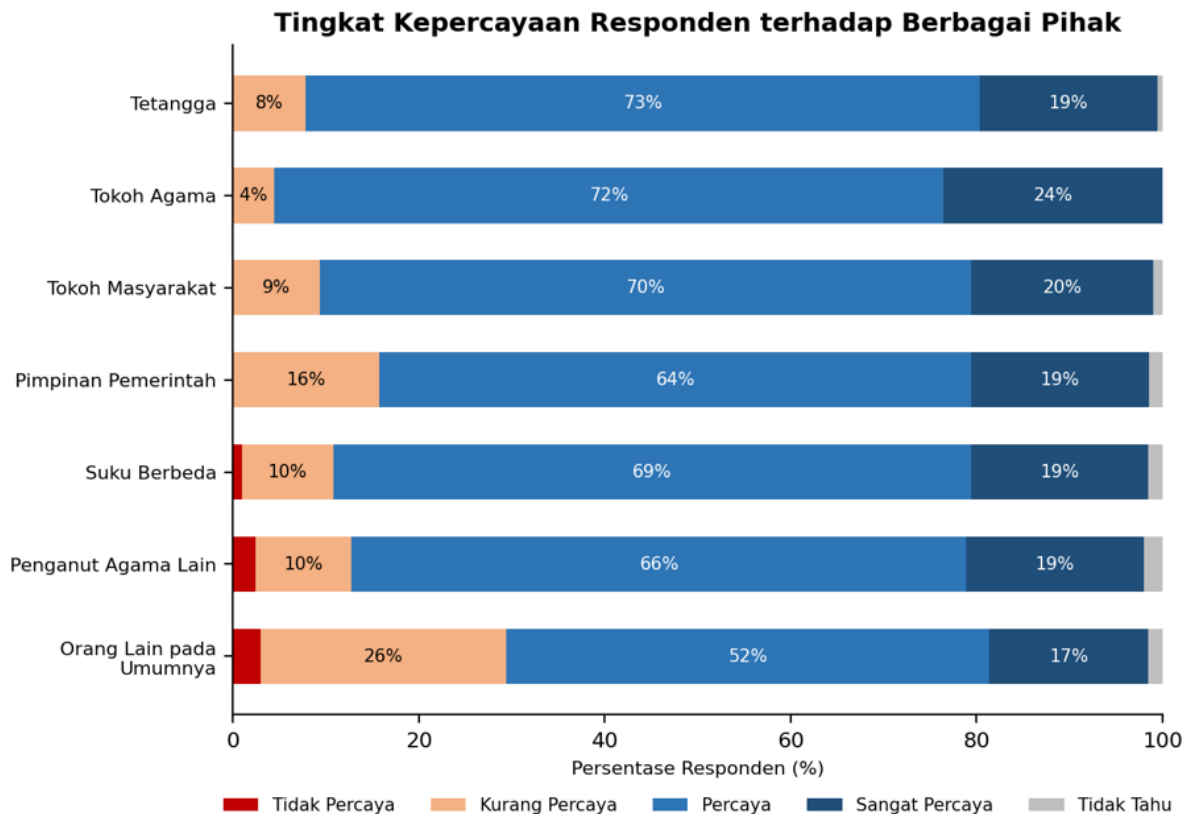
Gambar 8.2 Pengalaman Perlakuan Tidak Menyenangkan/Diskriminatif karena Perbedaan Agama

Pengalaman diskriminatif karena perbedaan agama relatif jarang dilaporkan, namun tetap ada dan perlu menjadi perhatian. Pengalaman tersebut paling banyak dilaporkan terjadi di lingkungan tempat tinggal (13,2 persen) dan di lingkungan sekolah/ perguruan tinggi (13,2 persen) kategori pernah, beberapa kali, atau sering. Angka ini menurun pada ranah tempat bekerja (7,8 persen) dan paling rendah ketika mengurus layanan publik pemerintah (5,9 persen). Meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan tingginya skor toleransi dan kesetaraan pada bab-bab sebelumnya, temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman diskriminatif belum sepenuhnya nihil, terutama pada ranah sosial informal (tetangga, sekolah) dibandingkan ranah formal (layanan publik, tempat kerja).

BAB IX

TINGKAT KEPERCAYAAN SOSIAL

Bagian ini mengukur tingkat kepercayaan (social trust) responden terhadap berbagai pihak, sebagai salah satu indikator modal sosial yang mendukung kerukunan.



Gambar 9.1 Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Berbagai Pihak

Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada tokoh agama (95,6 persen percaya/sangat percaya), diikuti oleh tetangga (91,7 persen) dan tokoh masyarakat (89,7 persen). Kepercayaan terhadap penganut agama lain (85,3 persen) dan suku berbeda (87,8 persen) juga tinggi sedikit di bawah kepercayaan terhadap tetangga, namun tetap menunjukkan modal sosial lintas identitas yang kuat. Tingkat kepercayaan terhadap pimpinan pemerintah berada pada 82,8 persen, sedikit lebih rendah dibanding tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

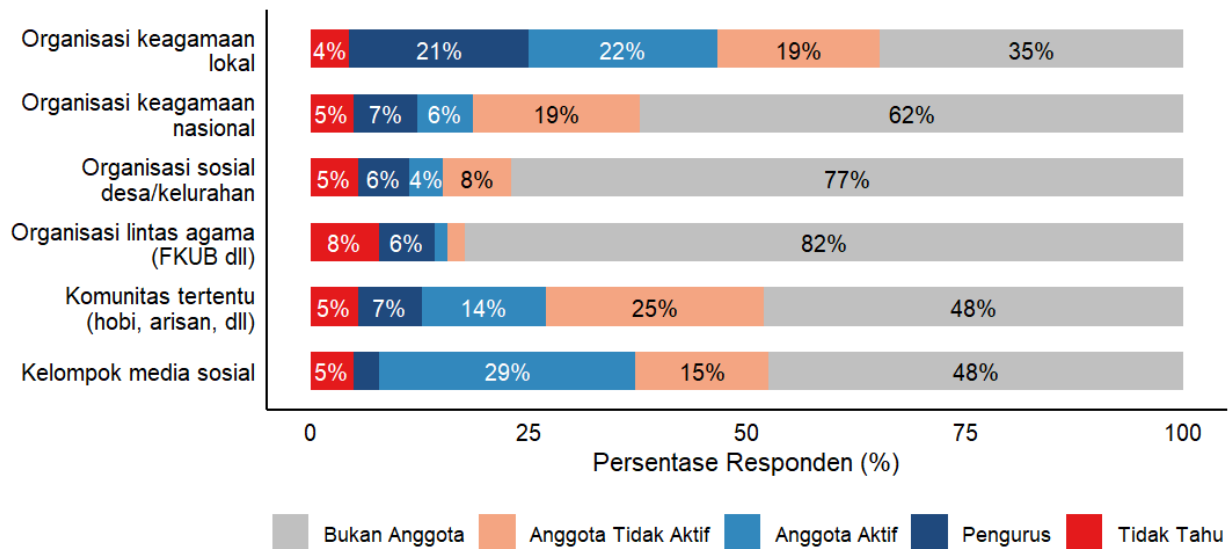
Temuan yang menarik adalah kepercayaan terhadap “orang lain pada umumnya” (generalized trust) merupakan yang terendah di antara seluruh kategori, yaitu 69,1 persen. Pola ini konsisten dengan teori modal sosial yang membedakan antara particularized trust (kepercayaan terhadap pihak yang dikenal atau memiliki identitas jelas, seperti tetangga atau tokoh agama) dengan generalized trust (kepercayaan terhadap orang asing/tidak dikenal secara umum), yang biasanya lebih rendah. Artinya, kerukunan di Lolu Utara lebih banyak ditopang oleh kepercayaan berbasis kedekatan dan relasi yang sudah terbangun, bukan oleh rasa percaya generik terhadap siapa pun tanpa mengenal latar belakangnya.

BAB X

PELIBATAN DALAM PERKUMPULAN MASYARAKAT

Bagian ini mengukur tingkat keterlibatan responden dalam berbagai jenis organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sebagai indikator partisipasi sosial yang dapat memperkuat maupun sekadar menyertai kerukunan antarumat beragama.

Keterlibatan Responden dalam Organisasi Kemasyarakatan



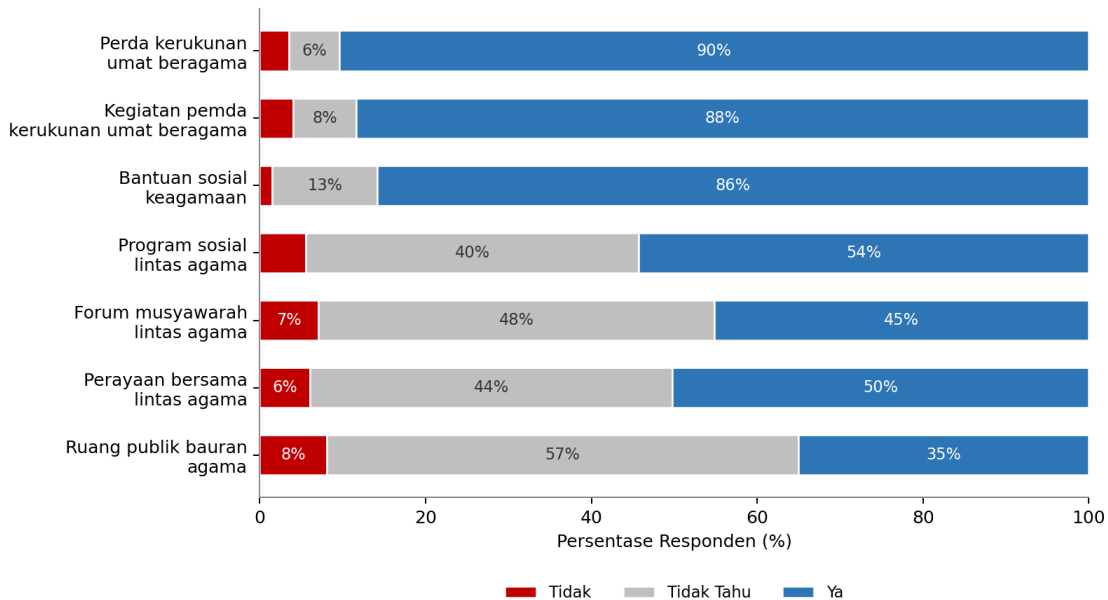
Gambar 10.1 Keterlibatan Responden dalam Organisasi Kemasyarakatan

Keterlibatan tertinggi terlihat pada organisasi keagamaan berskala lokal (remaja masjid, majelis taklim, perkumpulan jemaat gereja, dsb.), di mana 42,2 persen responden berstatus sebagai anggota aktif atau pengurus. Keterlibatan aktif dalam kelompok media sosial juga cukup tinggi (29,4 persen anggota aktif). Sebaliknya, keterlibatan dalam organisasi/perkumpulan lintas agama secara eksplisit seperti FKUB atau Forum Lintas Iman masih sangat terbatas 82,3 persen responden bukan anggota organisasi tersebut, dan hanya 7,8 persen berstatus anggota aktif atau pengurus. Pola serupa terlihat pada organisasi sosial desa/kelurahan seperti Karang Taruna, di mana 77,0 persen responden bukan anggota. Temuan ini mengindikasikan bahwa kerukunan yang tinggi di Lolu Utara belum banyak diinstitusionalisasikan melalui wadah formal lintas agama, melainkan lebih banyak berlangsung secara informal dalam kehidupan sehari-hari.

BAB XI

PENGETAHUAN PROGRAM/KEBIJAKAN KERUKUNAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini mengukur sejauh mana responden mengetahui keberadaan program atau kebijakan pemerintah daerah terkait kerukunan umat beragama.



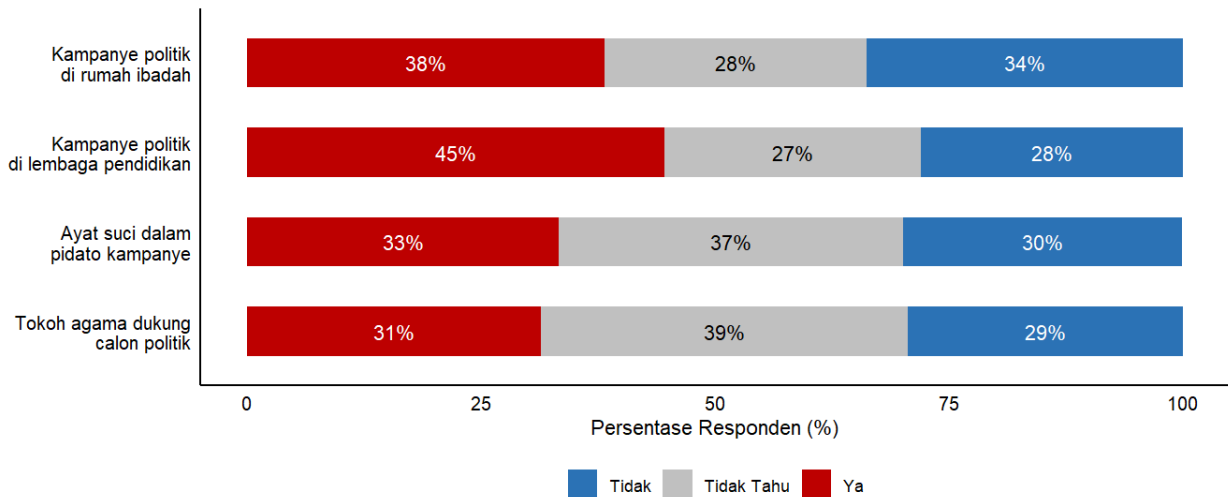
Gambar 11.1 Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Program/Kebijakan Kerukunan Pemerintah Daerah

Pengetahuan responden paling tinggi pada program yang bersifat regulatif dan umum, yaitu peraturan daerah terkait kerukunan umat beragama (91,2 persen mengetahui) dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait kerukunan umat beragama (89,2 persen). Pengetahuan menurun signifikan pada program yang lebih spesifik dan operasional: hanya 55,9 persen mengetahui adanya program Pemda terkait kegiatan sosial lintas agama, 47,1 persen mengetahui forum musyawarah lintas agama, dan hanya 37,2 persen mengetahui ketersediaan ruang publik yang dapat menjadi sarana bauran agama. Kesenjangan ini menunjukkan adanya peluang perbaikan pada aspek sosialisasi dan diseminasi informasi program pemerintah daerah, khususnya program-program yang sifatnya lebih teknis dan berjenjang lokal.

BAB XII

POTENSI POLITISASI AGAMA

Bagian ini mengukur persepsi responden mengenai ada tidaknya praktik politisasi agama di lingkungan mereka, sebagai salah satu potensi ancaman terhadap kerukunan umat beragama.



Gambar 12.1 Persepsi Responden terhadap Praktik Politisasi Agama di Lingkungan Sekitar

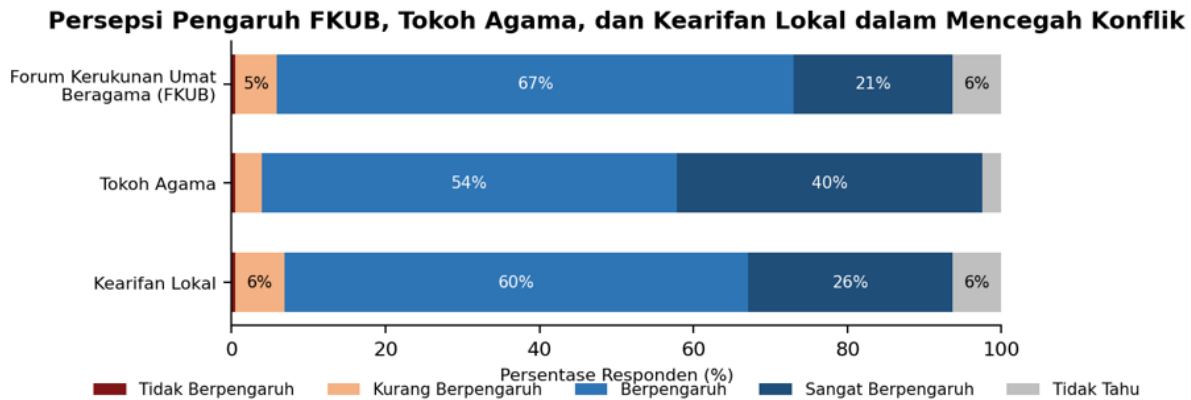
Berbeda dengan dimensi-dimensi kerukunan lainnya yang menunjukkan hasil sangat positif, bagian ini mengungkap temuan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebanyak 44,6 persen responden menyatakan pernah terjadi kampanye politik di lembaga pendidikan, dan 38,2 persen menyatakan pernah terjadi kampanye politik di rumah ibadah di lingkungannya. Penggunaan ayat suci atau kutipan kitab suci dalam pidato/slogan kampanye politik dilaporkan oleh 33,3 persen responden, dan penampilan tokoh agama yang mendukung calon politik tertentu dilaporkan oleh 31,4 persen responden. Proporsi responden yang menjawab “tidak tahu” juga cukup besar pada seluruh indikator, yang dapat mengindikasikan keterbatasan keterpaparan terhadap isu ini, bukan berarti ketiadaan praktik tersebut. Temuan ini menegaskan perlunya kewaspadaan dan penguatan regulasi/pengawasan terhadap praktik politisasi agama, khususnya di rumah ibadah dan lembaga pendidikan, sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan yang telah terbangun baik.

"Catatan: Seluruh temuan pada bab ini merupakan hasil persepsi agregat responden yang disajikan dalam bentuk statistik deskriptif, dan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, penilaian, maupun vonis terhadap institusi, sekolah, rumah ibadah, tokoh agama, atau pihak tertentu secara spesifik."

BAB XIII

PERAN FKUB, TOKOH AGAMA, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian ini mengukur persepsi responden terhadap peran berbagai pihak dan modal budaya lokal dalam mencegah konflik dan menjaga hubungan antarumat beragama.



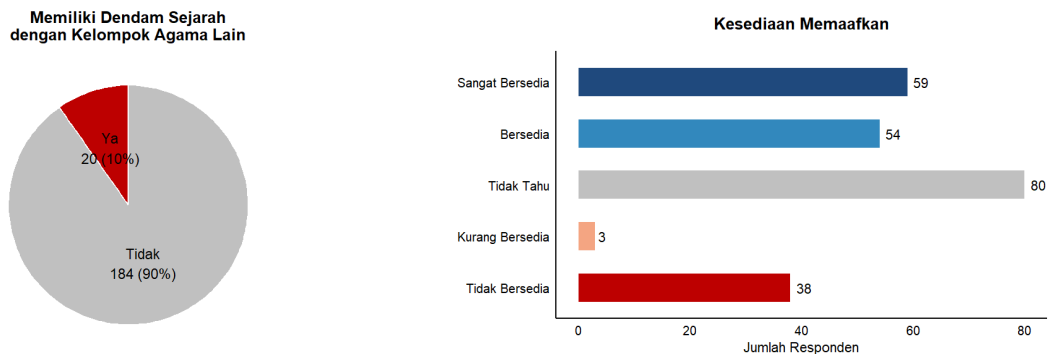
Gambar 13.1 Persepsi Pengaruh FKUB, Tokoh Agama, dan Kearifan Lokal dalam Mencegah Konflik

Tokoh agama dinilai sebagai pihak paling berpengaruh dalam mencegah konflik dan menjaga hubungan antarumat beragama, dengan 93,6 persen responden menilainya berpengaruh atau sangat berpengaruh sejalan dengan temuan Bab IX bahwa tokoh agama juga merupakan pihak yang paling dipercaya masyarakat. Kearifan lokal (pandangan hidup dan tradisi kehidupan sehari-hari) juga dinilai berpengaruh oleh 86,8 persen responden, menegaskan peran nilai-nilai budaya lokal Sulawesi Tengah sebagai perekat sosial. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai berpengaruh oleh 87,8 persen responden, meskipun sebagaimana ditemukan pada Bab X dan XI, tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam forum tersebut dan pengetahuan mengenai forum musyawarah lintas agama secara umum masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan pentingnya peran FKUB secara normatif dengan tingkat keterlibatan riil masyarakat di dalamnya sebuah peluang penguatan kelembagaan ke depan.

BAB XIV

PERISTIWA MASA LALU: DENDAM SEJARAH DAN PEMAAFAN

Bagian ini mengukur ada tidaknya permusuhan masa lalu (dendam sejarah) antarkelompok agama serta kesediaan responden untuk memaafkan peristiwa tersebut apabila ada.



Gambar 14.1 Keberadaan Dendam Sejarah dan Kesediaan Memaafkan

Sebagian besar responden (90,2 persen) menyatakan tidak memiliki permusuhan masa lalu (dendam sejarah) dengan kelompok agama lain. Namun demikian, terdapat 20 responden (9,8 persen) yang menyatakan memiliki dendam sejarah tersebut sebuah proporsi kecil namun tidak dapat diabaikan, mengingat potensinya sebagai bara laten yang dapat memicu ketegangan sosial di kemudian hari jika tidak ditangani.

Di antara responden yang memiliki dendam sejarah tersebut, mayoritas menunjukkan keterbukaan terhadap rekonsiliasi: 55,4 persen bersedia dan sangat bersedia memaafkan peristiwa tersebut, sementara proporsi yang cukup besar (39,2 persen) menjawab “tidak tahu” mengindikasikan sikap yang belum sepenuhnya terbentuk atau memerlukan proses lebih lanjut. Hanya sebagian kecil (5,4 persen) yang secara eksplisit menyatakan tidak bersedia atau kurang bersedia memaafkan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi program rekonsiliasi dan dialog lintas agama yang terarah, khususnya bagi kelompok responden dengan riwayat dendam sejarah yang masih ragu-ragu.

BAB XV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

15.1 Kesimpulan

- Secara umum, hasil pemutakhiran Survei Kerukunan Umat Beragama Lolu Utara 2026 menunjukkan kondisi kerukunan yang sangat baik. Tingkat toleransi, kesetaraan, dan kesediaan bekerja sama lintas agama seluruhnya berada pada kisaran 96-100 persen, dan bauran sosial pada ranah publik (pertemanan, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal) berlangsung sangat intensif. Beberapa temuan kunci dapat dirangkum sebagai berikut:
- Kerukunan sosial terjalin kuat pada ranah publik (pertemanan, dunia kerja, sekolah, ketetanggaan), namun bauran pada ranah keluarga inti masih rendah (7,3 persen).
- Sikap toleransi, kesetaraan, dan kesediaan kerja sama lintas agama hampir mutlak (≥ 96 persen pada sebagian besar indikator).
- Pengalaman diskriminatif relatif jarang namun tidak nihil, terutama pada ranah sosial informal (tetangga dan sekolah).
- Kepercayaan sosial tertinggi pada tokoh agama dan tetangga; kepercayaan umum (*generalized trust*) terhadap “orang lain pada umumnya” adalah yang terendah.
- Keterlibatan aktif dalam wadah lintas agama formal (FKUB, forum lintas iman) masih rendah, meski perannya diakui penting oleh mayoritas responden.
- Pengetahuan masyarakat terhadap program/kebijakan Pemda bersifat umum sudah baik, namun menurun tajam untuk program yang lebih teknis dan operasional.
- Indikasi politisasi agama khususnya kampanye politik di lembaga pendidikan (44,6 persen) dan rumah ibadah (38,2 persen) dilaporkan oleh sekitar sepertiga responden dan memerlukan perhatian serius.
- Sebagian kecil responden (9,8 persen) masih menyimpan dendam sejarah, meski mayoritas dari mereka terbuka untuk memaafkan.

15.2 Rekomendasi

- Memperkuat peran dan visibilitas FKUB serta forum lintas agama di tingkat kelurahan, termasuk sosialisasi keberadaan forum musyawarah lintas agama yang saat ini baru diketahui oleh kurang dari separuh responden.
- Melibatkan tokoh agama secara lebih aktif dalam program-program kerukunan, mengingat tingkat kepercayaan dan pengaruh mereka yang tertinggi di antara seluruh pihak yang diukur.
- Meningkatkan sosialisasi program/kebijakan Pemda yang bersifat teknis dan operasional (bantuan sosial keagamaan, ruang publik bauran agama, forum musyawarah lintas agama), yang tingkat pengetahuan publiknya masih rendah.
- Memperkuat pengawasan dan penegakan aturan larangan kampanye politik di rumah ibadah dan lembaga pendidikan, mengingat cukup tingginya laporan praktik tersebut di lingkungan responden.
- Merancang program dialog dan rekonsiliasi lintas agama yang menyasar khusus kelompok masyarakat dengan riwayat dendam sejarah, terutama kelompok yang masih bersikap ragu (“tidak tahu”) terhadap kesediaan memaafkan.

- Mendorong penguatan kearifan lokal sebagai instrumen perekat sosial melalui kegiatan budaya bersama lintas agama, mengingat pengaruhnya yang diakui tinggi oleh masyarakat.
- Melanjutkan pemantauan kerukunan umat beragama secara berkala melalui survei serupa, untuk memantau tren dan efektivitas program dari waktu ke waktu.

LAMPIRAN

- **Proses Pengambilan Data Tematik Di RT/RW lolu utara**

